

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- _____, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Jilid 1)*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta
- _____, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Jilid 2)*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta
- _____, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Jilid 5)*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta
- _____, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Jilid 6)*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta
- _____, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Jilid 7)*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, InHilco, Jakarta.
- Bakry, Noor Ms, 1986, *Logika Praktis*, Liberty, Yogyakarta.
- Bisariyadi, dkk, 2016, *Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Countouris, Nicola, 2019, *Defining and Regulating Work Relations for the Future of Work*, International Labour Organization, Jenewa.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1992, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta.

- Goesniadhie S., Kusnu, 2009, *Hukum Konstitusi dan Politik Negara Indonesia*, Penerbit Nasa Media, Malang.
- Hart, H.L.A, 2011, *Konsep Hukum*, Cintya Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta.
- International Labour Organization, 2013, *Decent Work Indicators: Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework Indicators*, ILO, Jenewa.
- Isharyanto, 2016, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi*, Pustaka Hanif, Jakarta.
- Ishariyanto dan Aryoko Abdurrachman, 2016, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi: Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, HM Publishing, Jakarta.
- Isra, Saldi, dkk, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahfud M.D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1977, *Asas-Asas Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Rahayu, Devi, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, Elmatra, Yogyakarta.
- Rawls, John, 2011, *Teori Keadilan: Dasar-Dasa Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Satria, Arif, 2015, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Obor, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soepomo, Iman, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- Syahruri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Trade Union Rights Centre, 2020, *Ekonomi Informal Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan*, Trade Union Rights Centre, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaya, Hendrawan Adi, 2009, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Pustaka Mandiri, Jakarta.

2. Jurnal

- Herdiana, Dadan, dan Abdul Hadi, “Tinjauan Yuridis Normatif tentang Penetapan Upah Minimum: Studi Komparasi Penetapan Upah Minimum Sebelum dan Setelah terbitnya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan”, *Prosiding Sentias 2020*, Vol. 1, No.1, Desember 2020, hlm. 324.

Isra, Saldi, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

Isra, Saldi dan Feri Amsari, “Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Konstitusi” *Jurnal Konstitusi* PUSaKO FH Unand Vol. 1, 1 Nov 2008.

Lailam, Tanto, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No.1 Juni 2014.

Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, *Jurnal Konsitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.

Post, Robert, “Theories of Constitutional Interpretation”, *Representations*, No. 30, Spring, 1990.

Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.

Sanjaya, Budiman, dkk, “Relasi Kerja Mandor dengan Buruh Pemetik Teh”, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 2, No.2, Tahun 2016, hal. 68

Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Keadilan”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 29, Nomor 1, Februari 2017.

3. Karya Ilmiah

Arisandi, Ernanto, 2018, *Hak Buruh yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mengundurkan Diri untuk Menuntut Upah yang Ditahan oleh Perusahaan (Studi Kasus di CV. SSG Yogyakarta)*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Awaliyah, Siti, 2017, “Diskriminasi Usia Bagi Pencari Kerja Dalam Suatu Hubungan Kerja Yang Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang.

Budiarta, Inyoman Putu, 2012, “Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia”, *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang.

Mujaddidi, Sipghotulloh, 2020, “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

4. Internet

Cambridge Dictionary

(<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/labour-relations>)
diakses pada 24 Agustus 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring,

(<https://kbbi.web.id/ambiguitas>) diakses pada 8 Desember 2021.

Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia

(<http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/>) diakses pada 20 Desember 2021.

“Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen”,
Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/-revisi-per-18-02-2021--agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>) diakses pada 10 Maret 2021.

“Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948”, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*
(<https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--R48R63.pdf>) diakses pada 26 November 2021.

“Employment Relationship”, *International Labour Organization*,
(http://www.ilo.int/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_CON_TXT_IFPDIAL_EMPREL_EN/lang--en/index.htm)
diakses pada 24 Agustus 2021.

“Fair Work Principles”, *Fairwork*, (<https://fair.work/en/fw/principles/>) diakses
pada 20 Desember 2021.

“Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966”, *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*
(<https://ham.go.id/cescr/>) diakses pada 26 November 2021.

Anwar, “Bagi Hasil Gojek”, (<https://www.ojolakademi.com/bagi-hasil-gojek/>)
diakses pada 11 Maret 2021.

As-shiddiqie, Jimly, “Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”, *Makalah Ketua Mahkamah Konstitusi RI*, diunduh dari
www.mk-ri.or.id, 1 Maret 2021.

Novianto, Arif, Anindya Dessi Wulansari, dan Ari Hermawan, “Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol”, *The Conversation* (<https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-para-ojol-159832>), diakses pada 6 Juni 2021.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Perubahan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja 1948

6. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

7. Instrumen Hukum Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966

Rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 198 tahun 2006 tentang Hubungan Kerja